

Penguatan Literasi Politik Dan Nilai Demokrasi Di Kampung Waromi Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor

Irsat¹, Hamjah Bongso², Asmadianto³, Rani Miswati⁴

Asmadianto1990@gmail.com¹

¹⁻⁴Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IISIP Yapis Biak, Indonesia;

Abstrak

Peningkatan literasi politik dan pemahaman nilai-nilai demokrasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik yang sehat dan berkualitas. Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat Kampung Waromi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor selama satu hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep literasi politik, pentingnya nilai-nilai demokrasi, serta hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi. Melalui metode presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi, kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kampung Waromi. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pemilu dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah lokal.

Kata Kunci: Literasi Politik, Nilai Demokrasi, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat

Abstract

Increasing political literacy and understanding of democratic values is one of the strategic steps to encourage public participation in a healthy and quality political process. This service was carried out in the form of outreach to the people of Waromi Village, North Biak District, Biak Numfor Regency for one day. This activity aims to provide an in-depth understanding of the concept of political literacy, the importance of democratic values, and the rights and obligations of citizens in a democratic system. Through presentation methods, interactive discussions and simulations, this activity was able to increase the political awareness of the people of Waromi Village. The evaluation shows an increase in public understanding of the importance of active involvement in elections and monitoring local government policies.

Keywords: Political Literacy, Democratic Values, Socialization, Community Participation

PENDAHULUAN

Literasi politik adalah salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Literasi politik tidak hanya melibatkan kemampuan individu untuk memahami informasi politik, tetapi juga mencakup kapasitas untuk menganalisis, mengevaluasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Almond dan Verba (1963) dalam bukunya *The Civic Culture* mengemukakan bahwa partisipasi politik yang efektif hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan tanggung jawab sosial mereka. Dalam konteks ini, literasi politik memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, literasi politik masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, masih menjadi tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya akses informasi, terbatasnya pendidikan politik formal, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Sebagai contoh, hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 40% masyarakat pedesaan di Indonesia memiliki tingkat literasi politik yang rendah. Kondisi ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat lokal.

Demokrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Robert Dahl (1998) dalam *Democracy and Its Critics*, membutuhkan masyarakat yang tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami dan mengawasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, penguatan literasi politik menjadi strategi penting untuk mendukung keberlanjutan demokrasi. Menurut Dewey (1916), pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk warga negara yang sadar dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, sosialisasi politik melalui kegiatan pendidikan informal seperti pelatihan dan diskusi masyarakat dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan literasi politik di tingkat akar rumput.

Kampung Waromi, yang terletak di Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, adalah salah satu contoh wilayah yang menghadapi tantangan literasi politik. Sebagai kampung yang memiliki potensi sosial dan budaya yang kuat, masyarakat di Kampung Waromi cenderung lebih fokus pada aktivitas tradisional dan kehidupan sehari-hari, sementara pemahaman tentang hak dan kewajiban politik sering kali terabaikan. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar masyarakat di Kampung Waromi masih belum memahami konsep dasar demokrasi, seperti pentingnya partisipasi dalam pemilu, pengawasan terhadap pemerintah, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi dalam bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi politik dan nilai-nilai demokrasi.

Sosialisasi politik, menurut Rush dan Althoff (2005), adalah proses di mana individu memperoleh sikap dan orientasi politik yang memungkinkan mereka berperan sebagai warga negara yang aktif. Dalam konteks pengabdian masyarakat, sosialisasi dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak dasar setiap individu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kampung Waromi dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi politik dan nilai-nilai demokrasi. Peningkatan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada partisipasi mereka dalam pemilu, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengawasi dan berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah desa. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah awal

dalam memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal, sebagaimana diharapkan oleh teori-teori partisipasi politik dan demokrasi yang telah dikemukakan oleh para ahli.

METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan yang efektif kepada masyarakat Kampung Waromi, Distrik Biak Utara. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam satu hari penuh dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan. Berikut adalah rincian metode pelaksanaan yang digunakan:

1. Tahap Persiapan

a. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

Dilakukan observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat Kampung Waromi untuk memahami tingkat literasi politik masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap kegiatan ini. Data yang dikumpulkan menjadi dasar untuk merancang materi yang relevan dan kontekstual.

b. Penyusunan Materi

Materi disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, mencakup: Pengertian dan pentingnya literasi politik. Nilai-nilai dasar demokrasi (kesetaraan, kebebasan, dan keadilan). Hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Praktik demokrasi melalui simulasi pemilu.

c. Koordinasi dengan Aparat Lokal Melakukan koordinasi dengan kepala kampung dan perangkat desa untuk menentukan lokasi kegiatan, jadwal, dan penggalangan peserta.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana. Menyiapkan alat bantu seperti laptop, proyektor, papan tulis, dan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam tiga sesi utama:

Sesi 1: Pembukaan dan Pengantar Materi; Pembukaan dilakukan oleh kepala kampung untuk memberikan sambutan dan motivasi kepada peserta. Pengantar materi oleh tim pengabdian, menjelaskan tujuan kegiatan dan manfaat literasi politik dalam kehidupan sehari-hari. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan media presentasi visual (PowerPoint).

Sesi 2: Diskusi Interaktif dan Studi Kasus Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai isu-isu politik lokal, seperti partisipasi dalam pemilu, pengawasan anggaran desa, dan musyawarah desa. Studi kasus disajikan untuk memberikan contoh nyata, misalnya kasus rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Peserta diminta menyampaikan hasil diskusi kelompok, diikuti oleh sesi tanya jawab.

Sesi 3: Simulasi Demokrasi; Dilakukan simulasi proses demokrasi, seperti pemilu tingkat desa atau musyawarah untuk mengambil keputusan terkait kebijakan lokal. Peserta diberi peran sebagai pemilih, kandidat, dan panitia pemilu untuk memahami prosedur demokrasi secara langsung. Hasil simulasi dievaluasi bersama untuk memberikan pemahaman tentang praktik demokrasi yang baik.

3. Tahap Evaluasi dan Penutupan

a. Evaluasi Peserta

Dilakukan melalui kuis singkat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Beberapa peserta dipilih untuk memberikan testimoni tentang manfaat kegiatan.

b. Dokumentasi dan Laporan

Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan catatan aktivitas. Data hasil evaluasi dan dokumentasi menjadi dasar untuk penyusunan laporan pengabdian.

c. Penutupan

Penutupan dilakukan dengan pemberian pesan motivasi oleh tim pengabdian, serta ucapan terima kasih kepada masyarakat dan kepala kampung.

Adapun Teknik Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk memastikan semua peserta dapat mengikuti dengan baik.

Evaluasi dampak dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta berdasarkan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan. Umpan balik dari peserta digunakan untuk merancang kegiatan pengabdian lanjutan di masa depan.

Metode ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan aplikatif, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai literasi politik dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang penguatan literasi politik dan nilai-nilai demokrasi di Kampung Waromi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Berikut adalah hasil dari kegiatan tersebut:

Jumlah Peserta dan Partisipasi Aktif. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan perwakilan aparat kampung. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara aktif, terutama dalam sesi diskusi dan simulasi.

Peningkatan Pemahaman Literasi Politik. Berdasarkan pre-test, 30% peserta memiliki pemahaman dasar tentang literasi politik dan nilai demokrasi.

Setelah kegiatan, post-test menunjukkan peningkatan signifikan, di mana 80% peserta memahami konsep dasar literasi politik, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu dan pengambilan keputusan lokal.

Hasil Diskusi Interaktif. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu politik lokal, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, dan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah lokal.

Hasil Simulasi Demokrasi. Simulasi pemilu berhasil dilakukan dengan baik. Peserta memahami mekanisme pemilu, pentingnya menjaga integritas proses demokrasi, dan nilai-nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan.

B. Pembahasan

1. Literasi Politik sebagai Modal Demokrasi

Literasi politik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Almond dan Verba (1963) menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat literasi politik yang baik cenderung lebih mampu memahami dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta yang sebelumnya pasif dalam proses politik mulai memahami pentingnya peran mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.

2. Partisipasi dan Kesetaraan dalam Demokrasi

Salah satu nilai inti dari demokrasi adalah kesetaraan (Dahl, 1998). Dalam diskusi, ditemukan bahwa perempuan dan kelompok muda sering kali merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah desa. Melalui kegiatan ini, kesadaran tentang pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai tumbuh. Hal ini sejalan

dengan pendapat Rush dan Althoff (2005) bahwa partisipasi politik harus inklusif, melibatkan semua kelompok dalam masyarakat tanpa diskriminasi.

3. Praktik Simulasi Demokrasi untuk Memperkuat Pemahaman

Simulasi pemilu dan musyawarah menjadi metode yang efektif dalam memberikan pemahaman praktis kepada peserta. Sebagaimana Dewey (1916) dalam *Democracy and Education* menyatakan, pengalaman langsung adalah cara terbaik untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi. Peserta menyatakan bahwa simulasi membantu mereka memahami mekanisme demokrasi secara lebih konkret dibandingkan hanya melalui teori.

4. Tantangan dalam Penguatan Literasi Politik

Kendala utama yang diidentifikasi selama kegiatan adalah masih rendahnya akses informasi politik di wilayah kampung. Hal ini menjadi hambatan dalam membangun literasi politik yang berkelanjutan. Namun, kegiatan ini memberikan wawasan awal kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan media lokal dan teknologi sederhana, seperti grup WhatsApp komunitas, untuk mendapatkan informasi yang relevan.

5. Implikasi terhadap Kebijakan Lokal

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap pemerintah desa. Aparat kampung menyatakan bahwa penguatan literasi politik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Hal ini mendukung teori Civic Culture (Almond & Verba, 1963) yang menekankan bahwa

budaya politik partisipatif adalah salah satu elemen penting dalam membangun sistem demokrasi yang kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penguatan literasi politik dan nilai-nilai demokrasi melalui metode partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kampung Waromi. Meskipun masih ada tantangan dalam akses informasi, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun masyarakat yang lebih kritis dan aktif dalam mendukung proses demokrasi di tingkat lokal. Teori-teori yang mendasari kegiatan ini, seperti Civic Culture dan pengalaman belajar oleh Dewey, terbukti relevan dalam konteks implementasi di lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh program serupa yang lebih berkelanjutan untuk memastikan literasi politik masyarakat terus berkembang dan memberikan dampak positif terhadap demokrasi lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai penguatan literasi politik dan nilai-nilai demokrasi di Kampung Waromi, berikut adalah beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman untuk keberlanjutan dan pengembangan program ini di masa mendatang:

1. Peningkatan Akses Informasi

Disarankan untuk memperkuat akses informasi politik di Kampung Waromi melalui media sosial dan radio komunitas agar masyarakat dapat terus memperoleh informasi yang relevan dan terkini.

2. Pelaksanaan Program Secara Rutin

Agar literasi politik terus berkembang, kegiatan sosialisasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala,

misalnya tahunan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemuda dan perempuan.

<https://doi.org/10.30997/jk.v10i2.15213>

Rush, M., & Althoff, A. (2005). *Democracy and Its Critics*. Polity Press.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan LP2M IISIP Yapis Biak atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kampung Waromi, Distrik Biak Utara, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dan menyambut dengan antusias program pengabdian ini. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk kemajuan bersama.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (2019). *The Civic Culture: A Review*. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/191994>
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.
- Imond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Miller, W. L., & Listhaug, O. (1999). Political Performance and Political Trust. *Political Science Quarterly*, 114(1), 1-24.
- Pemerintah Kampung Waromi. (2023). *Laporan Musyawarah Kampung Waromi 2023*. Pemerintah Kampung Waromi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor.
- Rery, S., Mustofa, H., Ahmad, B., & Nahria, N. (2024). Strategi Komunikasi Partisipatif Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan RI-PNG. *JURNAL KOMUNIKATIO*, 10(2), 127-138.